

Rangkuman Hasil Wawancara Penelitian

Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat

(Studi Kasus Pada Desa Adat Jimbaran Kabupaten Badung)

Narasumber : Ni Wayan Sriyanti
Jabatan : Pegawai Keuangan Desa Adat Jimbaran
Hari/Tanggal : Senin 07 Februari 2022
Waktu : 11.00 Wita
Tempat : Ruang Patengen Desa Adat Jimbaran

Peneliti	: Apakah Ibu mengetahui tentang terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran?
Narasumber	: Sejujurnya tidak mengetahui secara pasti fraud pengelolaan keuangan desa adat karena pada saat terjadinya belum menjadi pegawai keuangan desa adat. Menjadi pegawai keuangan desa adat mulai tahun 2014 setelah ada jabatan Plt. Kelihan Desa Adat Jimbaran.
Peneliti	: Apakah saat Ibu bertugas sebagai pegawai keuangan desa adat terdapat pedoman tertulis mengenai tata kelola kas desa adat?
Narasumber	: Pedoman secara baku dan tertulis untuk pegawai keuangan tidak ada, dimana dalam melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan intruksi dan arahan dari Patengen maupun Kelihan Desa Adat.
Peneliti	: Menurut Ibu mengapa fraud diperiode terdahulu seolah-olah terjadi pembiaran terutama oleh Kelihan Desa Adat?
Narasumber	: Semua kembali kepada kebijakan Kelihan Desa Adat, untuk keputusan melakukan pengeluaran merupakan kewenangan Kelihan Desa Adat, sebagai pegawai keuangan hanya menjalankan intruksi.

Peneliti	: Apa yang Ibu rasakan sebagai pegawai keuangan setelah terjadi fraud?
Narasumber	: Sejujurnya ada perasaan harus berhati-hati karena pekerjaan yang berhubungan dengan uang sangat sensitif dan rawan terjadi penyelewengan.
Peneliti	: Apa yang bisa Ibu sarankan kepada Kelihan Desa Adat dan Prajuritnya mengenai administrasi keuangan desa adat?
Narasumber	: Sebagai pegawai keuangan desa adat secara pribadi menyarankan supaya adanya pedoman tertulis dalam pengelolaan keuangan, dan untuk prajuru harus selalu transparan dan terbuka mengenai pengelolaan keuangan desa adat.



Rangkuman Hasil Wawancara Penelitian

Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat

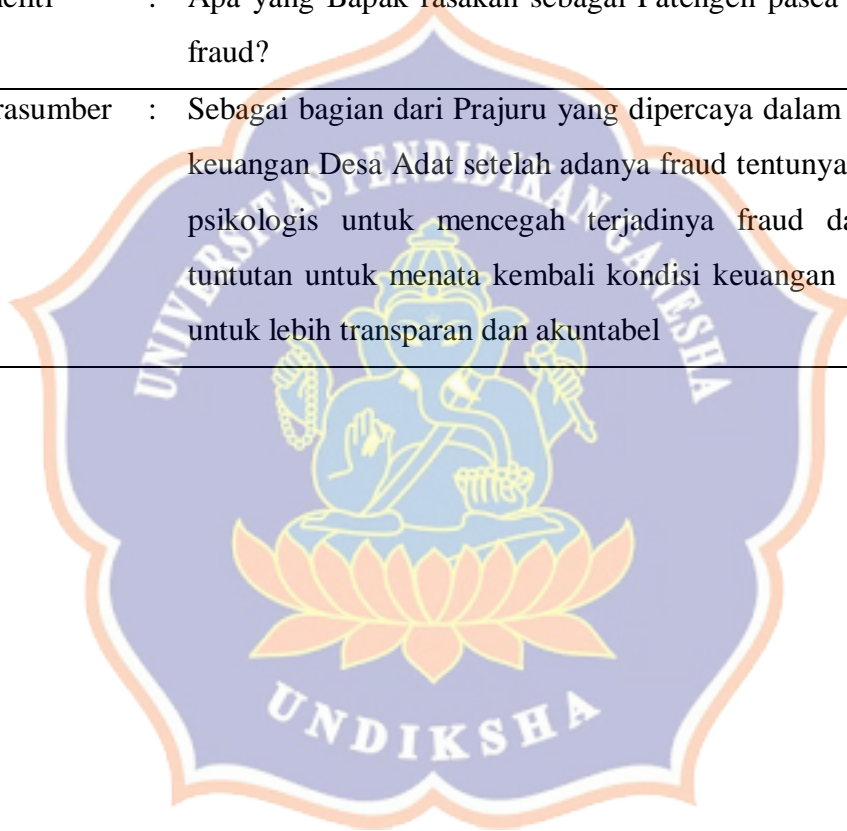
(Studi Kasus Pada Desa Adat Jimbaran Kabupaten Badung)

Narasumber : I Nyoman Arnaya SP. MM
Jabatan : Patengen Desa Adat Jimbaran Periode 2020 - 2025
Hari/Tanggal : Kamis 10 Februari 2022
Waktu : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Patengen Desa Adat Jimbaran

Peneliti	: Apakah Bapak berkenan memberikan penjelasan mengapa bisa terjadi fraud dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran?
Narasumber	: Terjadinya fraud dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran bisa disebabkan oleh beberapa hal : a. Karena tidak adanya aturan tertulis yang tertuang di dalam awig-awig maupun pararem b. Lemahnya pengawasan, baik internal maupun external. c. Adanya peluang maupun lemahnya akhlak / moral pengelola keuangan Desa Adat saat itu.
Peneliti	: Saat ini Bapak sebagai Patengen, dimana jabatan ini adalah pihak yang paling berhubungan dengan keuangan, apa yang menjadi kiat Bapak untuk mencegah terjadinya fraud?
Narasumber	: Dalam bekerja sebagai Patengen Desa Adat, ada beberapa hal yang coba kita terapkan dan lakukan, antara lain : a. Dalam pelaksanaan program kerja atau sebuah kegiatan harus diawali dengan perencanaan dan membentuk sebuah tim kerja.

	<p>b. Setiap rencana program yang sudah akan dilaksanakan harus membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang didukung dengan kajian maupun analisis.</p> <p>c. Kegiatan tersebut harus mendapat dukungan dari para Prajuru yang sekaligus akan menjadi tim pengawas.</p> <p>d. Selalu membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) atas pemasukan dan pengeluaran kas desa adat, serta LPJ kegiatan baik pembiayaan rutin atau kegiatan program secara disiplin dan laporan bulanan yang dipertanggung jawabkan di dalam rapat Prajuru.</p>
Peneliti	: Menurut Bapak bagaimana sistem pengendalian internal keuangan Desa Adat Jimbaran?
Narasumber	: Memang dalam pengelolaan keuangan desa adat tidak ada sistem pengendalian tertulis, namun semua pengelolaan keuangan kita coba buat alur seperti harus membuat RAB, selesai kegiatan menyetorkan LPJ paling lambat sesuai yang disepakati.
Peneliti	: Menurut Bapak bagaimana tata kelola keuangan Desa Adat Jimbaran, mulai dari perencanaan sampai pertanggung jawaban?
Narasumber	: Tata kelola keuangan Desa Adat saat ini kita upayakan supaya sistematis dan transparan. Hal-hal yang kita lakukan adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Setiap awal tahun, dilakukan dengan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RAT). b. Membuat alokasi anggaran sehingga penggunaan anggaran menjadi tepat sasaran dan mudah diawasi. c. Menyusun laporan penggunaan biaya kegiatan atau Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) secara disiplin setiap bulan atau setiap akhir kegiatan dan disampaikan dan dan dipertanggung jawabkan di dalam rapat Prajuru.

Peneliti	: Selama ini dasar hukum apa yang dijadikan pedoman dalam tata kelola keuangan Desa Adat Jimbaran?
Narasumber	: Untuk saat ini di Desa Adat Jimbaran tidak ada dasar yang dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan Desa Adat baik di awig-awig maupun Pararem, namun demikian dalam tata kelola keuangan selalu berpedoman pada hukum positif yaitu Perda Bali No 4 Tahun 2019
Peneliti	: Apa yang Bapak rasakan sebagai Patengen pasca terjadinya fraud?
Narasumber	: Sebagai bagian dari Prajuru yang dipercaya dalam mengelola keuangan Desa Adat setelah adanya fraud tentunya ada beban psikologis untuk mencegah terjadinya fraud dan adanya tuntutan untuk menata kembali kondisi keuangan Desa Adat untuk lebih transparan dan akuntabel



Rangkuman Hasil Wawancara Penelitian
Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat
(Studi Kasus Pada Desa Adat Jimbaran Kabupaten Badung)

Narasumber : I Wayan Muliawan, S.TP
Jabatan : Penyarikan Desa Adat Jimbaran Periode 2020-2025
Hari/Tanggal : Jumat 11 Februari 2022
Waktu : 11.00 Wita
Tempat : Ruangan Penyarikan Desa Adat Jimbaran

Peneliti	: Apakah Bapak berkenan memberikan penjelasan mengapa bisa terjadi fraud dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran?
Narasumber	: Fraud dalam pengelolaan keuangan desa adat bisa terjadi karena lemahnya sistem pengendalian dan masih administratif manual, terbatasnya SDM pegawai keuangan, saat itu patengen terlalu mempercayai kinerja pegawai keuangan, serta Kelihan Desa Adat tidak memahami alur keuangan dan terlalu percaya dengan Patengen dan pegawai keuangan desa adat. Disamping itu hasil laporan pertanggung jawaban keuangan tidak pernah diaudit oleh audit eksternal.
Peneliti	: Selama ini dasar hukum apa yang dijadikan pedoman dalam tata kelola keuangan Desa Adat Jimbaran?
Narasumber	: Selama ini dasar hukum yang digunakan lebih ke hasil paruman tingkat prajuru dan kelian adat banjar, sedangkan pada awig-awig desa adat belum mengatur secara jelas tentang keuangan desa adat. Selain itu juga berpedoman pada Perda Bali no 4 Tahun 2019, serta komunikasi dan control dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Propinsi Bali.

Peneliti	: Menurut Bapak bagaimana tata kelola keuangan Desa Adat Jimbaran, mulai dari perencanaan sampai pertanggung jawaban?
Narasumber	: Ketika terjadi fraud tata kelola keuangan desa adat kurang terencana dan tidak sistematis. Sedangkan saat sekarang tata kelola keuangan didahului dengan menyusun perencanaan melalui Rencana Anggaran Biaya atau Rencana Anggaran Tahunan yang disetujui dalam paruman prajuru bersama kelihan banjar adat, dari persetujuan kemudian baru dilakukan eksekusi terhadap kegiatan, dan Laporan Pertanggung Jawaban di disampaikan dan disahkan di tingkat paruman prajuru dan kelihan banjar adat.
Peneliti	: Apa yang dirasakan sebagai penyarikan pasca terjadinya fraud?
Narasumber	: Saat ini masih saja ada anggapan bahwa prajuru sekarang pasti sama dengan prajuru terdahulu, dengan demikian hal ini menjadi kekawatiran secara pribadi sebagai penyarikan desa adat dimana akan selalu bergesekan dengan krama, serta khawatir akan berhadapan dengan hukum positif bila melakukan fraud karena ada memanfaatkan dana pemerintah.

Rangkuman Hasil Wawancara Penelitian
Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat
(Studi Kasus Pada Desa Adat Jimbaran Kabupaten Badung)

Narasumber : I Gusti Made Rai Dirga Arsana Putra
Jabatan : Kelihan Desa Adat Jimbaran periode 2020 – 2025
Hari/Tanggal : Rabu 09 Februari 2022
Waktu : 11.00 Wita
Tempat : Ruang Kelihan Desa Adat Jimbaran

Peneliti	: Apakah Bapak berkenan memberikan penjelasan mengapa bisa terjadi fraud dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran?
Narasumber	: Fraud/kecurangan terjadi karena rendahnya integritas para pihak pengelola keuangan desa adat saat itu sehingga menyebabkan beberapa kemungkinan kecurangan. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi : a. Untuk memperkaya diri sendiri b. Mengikuti gaya hidup masa kini c. Adanya Kerjasama menguntungkan beberapa pihak yang dekat dengan pengambil keputusan.
Peneliti	: Bagaimana kiat dari Bapak sebagai Kelihan Desa Adat untuk mencegah terjadinya fraud.
Narasumber	: Ada beberapa kiat yang coba saya terapkan a. Pada saat terpilih mencoba memilih tokoh-tokoh yang memiliki integritas dan jujur, serta orientasi ngayah. b. Dalam menjalankan pemerintahan Desa Adat Jimbaran selalu mengupayakan transparansi di internal prajuru mengenai kondisi keuangan, agar prajuru bisa

	<p>menyampaikan ke krama sesuai dengan kondisi apa adanya.</p> <p>c. Selalu membuat laporan berkala untuk disampaikan ke pihak eksternal, baik itu krama, dinas terkait seperti Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan dalam Perda, Pergub yang berlaku.</p>
Peneliti	: Bagaimana Bapak membuat sistem pengendalian internal keuangan desa adat saat ini?
Narasumber	: Dengan adanya Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, maka secara khusus tata kelola keuangan desa adat terkontrol dengan sistem administrasi yang lebih tertata dan lebih disiplin dari sebelumnya.
Peneliti	: Bagaimana Bapak membuat tata kelola keuangan desa adat, mulai dari perencanaan sampai pertanggung jawaban?
Narasumber	: Saat ini mencoba membuat tata kelola keuangan dengan lebih terstruktur, yaitu <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan keuangan dimulai dari penyusunan program. b. Menyusun RAB setiap program yang membutuhkan dana desa adat. c. Selalu berusaha melakukan kontrol pada penggunaan anggaran. d. Selalu menekankan kepada Patengen dan pegawai keuangan desa adat untuk selalu melengkapi sistem pencatatan dengan bukti dan dokumentasi administrasi seperti catatan-catatan atau kwitansi.
Peneliti	: Dasar hukum apa yang Bapak bersama prajuru jadikan pedoman dalam tata kelola keuangan desa adat?
Narasumber	: Dalam mengelola keuangan dan memutuskan suatu kebijakan selalu berpedoman kepada adalah Awig-Awig Desa Adat Jimbaran Tahun 986, Pararem penyusunan anggaran, Berita

	Acara Rapat Penggunaan Dana, serta Perda Bali No 4 tahun 2019
Peneliti	: Selain berpedoman pada peraturan desa adat, apakah Bapak juga mengelola penerimaan atau pengeluaran kas dengan dasar kebijakan.?
Narasumber	: Mengelola keuangan baik itu penerimaan atau pengeluaran terkadang juga berdasarkan kebijakan terutama yang bersentuhan dengan krama, namun tentu melalui paruman. Misalnya kebijakan penerimaan yang bersumber dari iuran krama, seperti iuran dari krama yang menggunakan tanah desa adat sebagai tempat tinggal, yang tidak seketat non krama, atau iuran krama yg berprofesi sebagai pedagang UMKM. Sedangkan kebijakan pengeluaran lebih banyak yang sifatnya berhubungan dengan biaya parahyangan, pengeluaran untuk biaya kesehatan pemangku Pura Kahyangan Tiga atau Pura Ulun Swi, ataupun pengeluaran yang berhubungan dengan kebersihan Desa Adat Jimbaran
Peneliti	: Apa yang Bapak rasakan sebagai kelihan desa adat pasca terjadinya fraud.
Narasumber	: Diawal periode ada tekanan beban yang dirasakan akibat permasalahan masa lalu yang menyebabkan rendahnya kepercayaan krama. Adanya kesulitan merubah pandangan krama terhadap prajuru, hal ini membuat kehati-hatian dalam penggunaan dana desa adat.

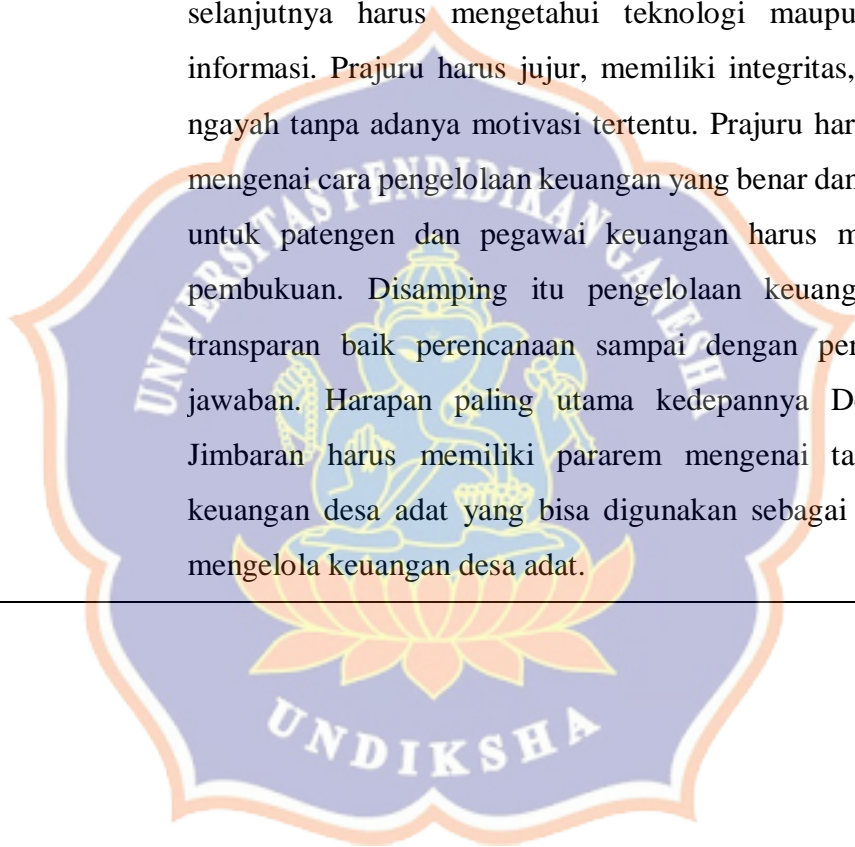
Rangkuman Hasil Wawancara Penelitian
Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat
(Studi Kasus Pada Desa Adat Jimbaran Kabupaten Badung)

Narasumber : Drs. I Made Kariyasa, SH., MH
Jabatan : Penyarikan periode 2015 – 2020
Hari/Tanggal : Minggu 13 Februari 2022
Waktu : 09.00 Wita
Tempat : Rumah tinggal narasumber

Peneliti	: Apakah Bapak berkenan memberikan penjelasan mengapa bisa terjadi fraud dalam pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran?
Narasumber	: Terjadinya fraud saat itu bisa terjadi karena lemahnya administrasi, pengelolaan yang dilakukan kurang professional, kurang pahamiannya pegawai keuangan dengan pembukuan, pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan parumana, dan ada kebijakan sendiri dari kelihan desa adat.
Peneliti	: Menurut Bapak bagaimana sistem pengendalian internal keuangan Desa Adat Jimbaran?
Narasumber	: Sebelum adanya Perda Bali No 4 tahun 2019 tidak ada dasar acuan sistem pengendalian internal. Ketika menjabat segala hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan dana desa adat baik itu program rutin atau program kerja selalu berdasarkan keputusan paruman. Namun setelah adanya Perda Bali No. 4 tahun 2019, pengelolaan keuangan mencoba mengadopsi ketentuan-ketentuan yang ada mulai dari perencanaan, administrasi, maupun pertanggung jawaban.

Peneliti	: Menurut Bapak bagaimana tata kelola keuangan desa adat, mulai dari perencanaan sampai pertanggung jawaban.
Narasumber	: Jauh sebelum menjabat tata kelola masih tradisional, namun setelah menjabat sebagai penyarikan memang tidak membuat perencanaan tapi tetap pengeluaran berdasarkan paruman dan LPJ selalu rutin setiap bulan disampaikan. Setelah berlakunya perda 4 tahun 2019, mencoba membuat pengelolaan keuangan yang lebih baik dengan membuat perencanaan pengeluaran.
Peneliti	: Pada saat Bapak menjabat sebagai penyarikan periode 2015-2020 dasar hukum apa yang dijadikan pedoman oleh Kelihan Desa Adat saat itu bersama prajuru lainnya dalam tata kelola keuangan desa adat?
Narasumber	: Ketika itu pernah berencana membuat pararem tentang tata kelola keuangan desa adat, namun terkendala waktu pararem tidak dapat diwujudkan. Memang secara fakta belum ada pedoman tertulis yang menuangkan cara pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran, namun dalam menjalankan pengelolaan keuangan selalu menggunakan kebijakan dan kewenangan kelihan desa adat yang mendapat persetujuan paruman. Barulah setelah terbitnya Perda Bali No. 4 tahun 2019 memiliki acuan atau dasar hukum untuk melakukan tata kelola keuangan desa adat.
Peneliti	: Apa yang Bapak rasakan ketika menjadi prajuru tepat setelah periode prajuru sebelumnya yang melakukan fraud?
Narasumber	: Saat awal-awal ada perasaan khawatir, karena menjadi prajuru tepat diperiode setelah adanya temuan-temuan fraud. Bahkan tidak berani membuat program dengan jumlah anggaran besar, dan sampai pernah mepending penggunaan uang dalam jumlah besar. Namun seiring berjalannya waktu rasa khawatir melakukan kesalahan perlahan menghilangkan. Selama

	menjadi prajuru selalu berhati-hati dalam mengambil kebijakan. Setiap eksekusi kebijakan selalu dibekali dengan berita acara keputusan paruman.
Peneliti	: Saat ini sebagai krama dan sebagai mantan prajuru, apa harapan Bapak kepada prajuru selanjutnya agar kejadian fraud tidak terulang.
Narasumber	: Harapan pribadi sebagai krama untuk prajuru-prajuru selanjutnya harus mengetahui teknologi maupun sistem informasi. Prajuru harus jujur, memiliki integritas, dan siap ngayah tanpa adanya motivasi tertentu. Prajuru harus paham mengenai cara pengelolaan keuangan yang benar dan terutama untuk patengen dan pegawai keuangan harus memahami pembukuan. Disamping itu pengelolaan keuangan harus transparan baik perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban. Harapan paling utama kedepannya Desa Adat Jimbaran harus memiliki pararem mengenai tata kelola keuangan desa adat yang bisa digunakan sebagai pedoman mengelola keuangan desa adat.



Rangkuman Hasil Wawancara Penelitian
Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat
(Studi Kasus Pada Desa Adat Jimbaran Kabupaten Badung)

Narasumber : I Made Budiasa SH
Jabatan : Kelihan Desa Adat Periode 2010 – 2014
Periode terjadi fraud
Hari/Tanggal : Sabtu 12 Februari 2022
Waktu : 10.00 Wita
Tempat : Rumah tinggal narasumber

Peneliti	: Apakah Bapak dapat memberikan informasi mengapa bisa terjadi fraud pada saat Bapak menjabat sebagai kelihan desa adat?
Narasumber	: Sesungguhnya belum bisa dikatakan sebuah fraud, karena saat temuan-temuan periode kaprajuruan masih aktif dan belum membuat laporan pertanggung jawaban akhir periode. Saat menjabat ada beberapa kebijakan yang dibuat yang bersentuhan dengan krama, seperti program ngaben masal, renovasi pura, dan pemberian pinjaman untuk pembangunan pasar. Karena keterbatasan prajuru dan pegawai keuangan saat itu laporan pertanggung jawaban atas program-program tersebut tidak bisa dengan cepat diselesaikan.
Peneliti	: Mengapa terlihat seolah-olah memberikan ruang bagi prajuru untuk melakukan fraud?
Narasumber	: Seperti penyampaian diawal, kejadian ini bukan murni sebuah fraud atau penyelewengan. Kami akui bahwa proses adminisitrasi saat itu lemah pencatatan masih manual, serta kurangnya kemampuan pegawai keuangan mengenai

	<p>pembukuan. Selain itu ada perasaan ewuh pakewuh ketika prajuru hendak meminjam kas untuk kepentingan pribadi seperti biaya pendidikan anak-anak, maupun biaya kesehatan anak.</p>
Peneliti	<p>: Apa yang Bapak rasakan saat aktif sebagai Kelihan Desa Adat Jimbaran setelah diketahui keprajuruan Bapak melakukan fraud?</p>
Narasumber	<p>: Pada saat dikatakan melakukan fraud ada perasaan tertekan, namun seiring waktu bisa menerima dan menyadari hal ini adalah sebuah perjalanan kehidupan.</p> <p>Ketika itu kami di prajuru tidak diberi ruang sedikitpun untuk melakukan pembelaan, namun sebenarnya pun jika kami melakukan pembelaan bisa dan sah-sah saja, akan tetapi hal itu tidak kami lakukan demi menjaga situasi menjadi lebih kondusif. Pada akhirnya saya pribadi saat itu bersedia mempertanggung jawabkan segala tuntutan dan tuduhan penyelewangan dengan melakukan ganti rugi sebagai konsekwensi dari jabatan sebagai Kelihan Desa Adat.</p>
Peneliti	<p>: Apa yang Bapak rasakan setelah selesai menjabat sebagai Kelihan Desa Adat Jimbaran?</p>
Narasumber	<p>: Seiring waktu merasa ikhlas, semua kejadian-kejadian yang terjadi selama menjabat adalah sebuah perjalanan kehidupan yang memang harus dilalui.</p>
Peneliti	<p>: Apa harapan Bapak sebagai mantan Kelihan Desa Adat dan sebagai krama bagi prajuru-prajuru di periode-periode berikutnya.</p>
Narasumber	<p>: Secara pribadi selalu berharap kepada prajuru-prajuru dimasa berikutnya selalu berbuat dan berperilaku positif. Serta tetap menjalankan program yang bersentuhan dengan krama tetap dilakukan salahsatunya seperti ngaben masal yang</p>

merupakan program unggulan ketika saya menjadi Kelihan Desa Adat, walaupun akan menimbulkan pembiayaan yang besar. Sedangkan dari sisi keuangan harus dikelola dengan sebaiknya dan memperdayakan SDM yang memiliki kemampuan mengenai tata kelola keuangan.



Rangkuman Hasil Wawancara Penelitian
Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat
(Studi Kasus Pada Desa Adat Jimbaran Kabupaten Badung)

Narasumber : I Wayan Sutaryasa, ST
Jabatan : Patengen Desa Adat Periode 2010 – 2014
Salah satu pelaku fraud
Hari/Tanggal : Sabtu 12 Februari 2022
Waktu : 19.30 Wita
Tempat : Rumah tinggal narasumber

Peneliti	: Apa yang menjadi motif Bapak, ketika Bapak dinyatakan melakukan fraud?
Narasumber	: Diawal penunjukan sebagai patengen sebenarnya sudah menyampaikan ke Kelihan Desa Adat saat itu, bahwa waktu ngayah akan sangat terbatas, tidak bisa setiap hari melakukan kontrol terhadap pengelolaan keuangan, karena disibukan oleh kegiatan sehari-hari. Petunjuk dari Kelihan Desa Adat bahwa untuk mensiasati jarang ke kantor maka ketika memiliki waktu dilakukanlah penarikan dengan jumlah cukup besar. Hal inilah menyebabkan uang tunai beredar dalam jumlah besar. Uang tunai inilah yang kemudian dikelola oleh pegawai keuangan. Jadi sedikitpun tidak pernah terpikirkan melakukan fraud.
Peneliti	: Apa celah yang ada sehingga bisa melakukan fraud.
Narasumber	: Karena uang tunai banyak beredar, tentu rentan dengan kesalahan administrasi, apalagi administrasi ketika itu masih manual.

	<p>Pada saat itu banyak pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh prajuru tanpa persetujuan rapat dan tanpa pengetahuan patengen. Kelihan Desa Adat waktu itu memberikan pinjaman atas dasar ewuh pakewuh.</p>
Peneliti	: Apa yang Bapak rasakan saat aktif sebagai prajuru pada saat fraud diketahui.
Narasumber	: Saat dituduh melakukan fraud, terdapat perasaan syok dan tekanan mental. Apalagi ketika itu kami sedikitpun tidak kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Saat temuan-temuan kami belum menyelesaikan masa jabatan, sehingga masih memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan perbaikan. Namun saat itu tidak bisa berbuat banyak dan yang bisa dilakukan hanya pasrah dan siap menerima semua konsekwensi.
Peneliti	: Apa yang Bapak rasakan setelah tidak aktif sebagai prajuru.
Narasumber	: Setelah tidak menjadi prajuru mencoba untuk tidak mengambil hati. Andaikan bisa memutar waktu mungkin tidak bersedia menerima jabatan sebagai Patengen Desa Adat Jimbaran.
Peneliti	: Apa yang bisa Bapak sarankan bagi prajuru di periode-periode berikutnya.
Narasumber	: <p>Kejadian yang terjadi pada saat itu karena lemahnya control terhadap pengelolaan keuangan desa adat, serta kurangnya kemampuan pembukuan pegawai keuangan saat itu, serta terbatasnya waktu ngayah bagi prajuru.</p> <p>Harapan sebagai krama agar kejadian ini tidak terulang kembali diperlukan Patengen Desa Adat yang memang memiliki waktu lebih untuk melakukan kontrol terhadap keuangan desa adat. Setiap penggunaan uang harus dengan perencanaan yang jelas serta pertanggungjawaban yang</p>

transparan. Atas kejadian di masa lalu, prajuru-prajuru selanjutnya tidak perlu merasa takut dan khawatir untuk berbuat dan mengambil kebijakan demi kepentingan krama dengan tata kelola administrasi dan tata kelola keuangan yang baik.



Rangkuman Hasil Wawancara Penelitian
Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat
(Studi Kasus Pada Desa Adat Jimbaran Kabupaten Badung)

Narasumber : I Wayan Warka, SE
Jabatan : Prajuru Desa Adat Periode 2010 – 2014
Salah satu pelaku fraud
Hari/Tanggal : Sabtu 12 Februari 2022
Waktu : 08.00 Wita
Tempat : Rumah tinggal narasumber

Peneliti	: Apa yang menjadi motif Bapak, ketika Bapak dinyatakan melakukan fraud?
Narasumber	: Adanya temuan bahwa ada uang yang belum dikembalikan ketika menjadi bendahara proyek itu murni kesalahan administrasi. Uang sudah dikembalikan ke pegawai keuangan desa adat namun karena keterbatasan pegawai, pengembalian lupa dibukukan kembali, dan daftar prajuru yang masih membawa uang belum dihapus pada catatan. Jadi sejujurnya tidak pernah memiliki motif untuk melakukan fraud
Peneliti	: Apa celah yang ada sehingga bisa melakukan fraud.
Narasumber	: Secara umum fraud dapat saja terjadi, karena penggunaan dana desa adat adalah kebijakan dan kewenangan Kelihan Desa Adat.
Peneliti	: Apa yang Bapak rasakan saat aktif sebagai prajuru pada saat fraud diketahui.
Narasumber	: Saat itu merasakan tekanan, ada rasa malu di keluarga ataupun masyarakat.

	<p>Pada saat itu kami tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, seperti mendatangkan pengacara ataupun auditor independent untuk membuktikan adanya kecurangan yang dituduhkan, karena ini murni karena keterbatasan kemampuan pengelola keuangan desa adat. Ketika itupun masa jabatan keprajuruan belum selesai, sehingga LPJ satu periode belum kami selesaikan. Akan lebih elok jika kami diberi waktu sampai akhir periode jabatan untuk mempertanggungjawabkan semua sangkaan kepada kami.</p>
Peneliti	: Apa yang Bapak rasakan setelah tidak aktif sebagai prajuru.
Narasumber	: Awalnya ada perasaan terpukul, ada rasa malu baik di keluarga kecil, keluarga besar, maupun masyarakat. Seiring waktu dapat melupakan kejadian tersebut, dan bahkan pada tahun 2020 dipercaya oleh krama Br Adat Angga Swara sebagai Kelihan Banjar Adat periode tahun 2020 - 2025, hal ini membuktikan bahwa krama masih menaruh kepercayaan.
Peneliti	: Apa yang bisa Bapak sarankan bagi prajuru di periode-periode berikutnya.
Narasumber	: Sebagai mantan prajuru dan sebagai krama desa adat, yang dapat disarankan dari sisi administrasi harus ada kontrol yang ketat baik mengenai pemasukan dan pengeluaran keuangan desa adat. Selain itu prajuru harus memiliki integritas dan selalu jujur saat menggunakan keuangan desa adat untuk kepentingan krama.

Rangkuman Hasil Wawancara Penelitian

Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat

(Studi Kasus Pada Desa Adat Jimbaran Kabupaten Badung)

Narasumber : Dr. I Made Sudira, SE., SH., MH
Jabatan : Anggota Forum Peduli Jimbaran
Hari/Tanggal : Minggu 13 Februari 2022
Waktu : 15.00 Wita
Tempat : Rumah tinggal narasumber

Peneliti	: Apakah Bapak dapat memberikan informasi bagaimana awal mula terbentuknya Forum Peduli Jimbaran.?
Narasumber	: Forum Peduli Jimbaran merupakan suatu wadah yang di bentuk oleh sekumpulan krama ngarep Desa Adat Jimbaran yang mempunyai persepsi dan pemikiran yang sama serta kepedulian terhadap kondisi Desa Adat Jimbaran. Terbentuknya Forum ini dilatar belakangi oleh karena susahnya membangun komunikasi dengan prajuru desa adat saat itu yang disinyalir adanya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa adat. Sehingga satu-satunya jalan untuk memudahkan dalam membangun komunikasi dengan Kelihan Desa Adat beserta jajaran prajurunya, maka dibentuklah suatu forum komunikasi yang diberi nama Forum Peduli Jimbaran.
Peneliti	: Apakah Bapak bisa menjelaskan mengapa bisa mengetahui terjadi fraud pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran?
Narasumber	: Awal mula di ketahui adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa adat di dapat dari laporan keuangan yang dilaporkan oleh prajuru desa adat setiap bulannya ke banjar-

banjar, dimana dalam laporan tersebut ditemukan terjadi ketidak sinkronan penyajian laporan keuangan. Sehingga menimbulkan kecurigaan dari krama untuk mengetahui dan menggali lebih dalam terhadap laporan keuangan yang disampaikan ke banjar-banjar tersebut.

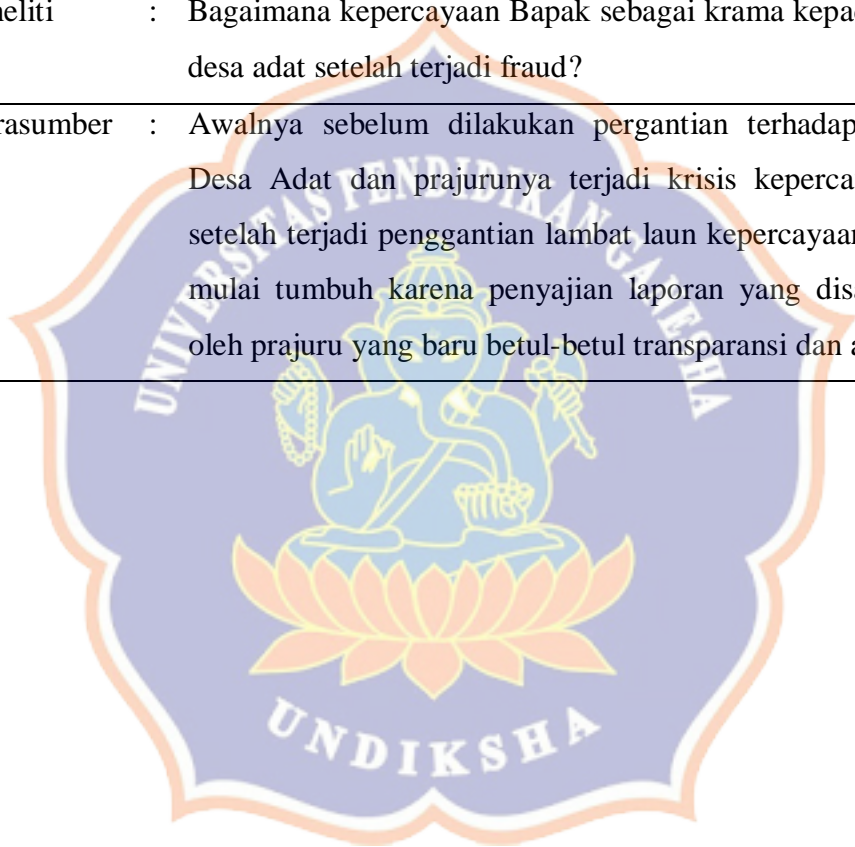
Peneliti : Langkah -langkah apa yang ditempuh oleh forum ini untuk menemukan dan membuktikan terjadi fraud pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran?

Narasumber : Pada saat itu begitu ditemukan ketidaksinkronan dalam penyajian laporan, maka langkah-langkah yang diambil oleh Forum yaitu:

- a. Ssecara intensif mengumpulkan bukti-bukti laporan keuangan yang disampaikan oleh prajuru desa adat setiap bulannya dalam 3 tahun terakhir.
- b. Setelah bukti terkumpul maka membuat surat kepada Kelihan Desa Adat dan prajurunya untuk minta waktu audensi sekaligus menanyakan terhadap temuan-temuan tersebut.
- c. Proses klarifikasi dan pendalam terhadap penyimpangan pengelolaan keuangan desa adat tersebut memakan waktu 6 bulan dimana agenda pertemuan tersebut dilakukan setiap seminggu sekali yang disepakati setiap hari sabtu.
- d. Adapun pihak-pihak yang dimintai keterangan adalah semua orang yang terlibat ataupun dianggap mengetahui terhadap peristiwa tersebut.
- e. Setelah keterangan terkumpul maka forum merekomendasikan dan mendorong agar dilaksanakan Paruman Agung yang melibatkan unsur-unsur perwakilan penatahan, kelihan adat dan dinas, serta prajuru desa adat.

	<p>f. Hasil paruman memutuskan untuk memberhentikan Kelihan Desa Adat Jimbaran dan beberapa prajurunya yang terlibat karena di anggap terbukti melakukan pelanggaran dengan keputusan mengembalikan keuangan desa adat serta selanjutnya dikenakan sanksi adat dengan melakukan ngaturang bendu sebagai wujud permintaan maaf secara niskala.</p>
Peneliti	: Pada saat itu risiko terbesar apa yang diperkirakan muncul jika kecurangan-kecurangan yang terjadi diumumkan ke seluruh krama, baik itu risiko secara umum mengenai tata kelola pemerintahan Desa Adat Jimbaran maupun risiko secara pribadi sebagai anggota forum.
Narasumber	: Pada saat itu risiko terbesar yang terjadi di masyarakat yaitu timbulnya krisis kepercayaan terhadap Kelihan Desa Adat dan prajurunya dalam pengelolaan keuangan desa adat sehingga muncul desakan yang sangat kuat dari masyarakat untuk segera melengserkan Kelihan Desa Adat Jimbaran dan prajurunya. Sedangkan resiko pribadi selaku anggota forum tentu kita dituntut untuk betul-betul menyajikan dan menampilkan data-data secara valid dan akurat serta data tersebut betul-betul diakui dan dibenarkan oleh oknum pelaku dengan membubuhkan tanda tangan.
Peneliti	: Saran apa yang Bapak dapat diberikan kepada prajuru desa adat untuk mencegah terjadinya fraud pengelolaan keuangan desa adat?
Narasumber	: Saran yang dapat diberikan kepada prajuru desa adat yaitu menampilkan laporan keuangan desa adat secara valid dan akuntabel tanpa merkayasa laporan.
Peneliti	: Apa yang Bapak rasakan sebagai krama desa adat sebelum fraud diketahui dan setelah fraud diketahui.

Narasumber	: Yang dapat dirasakan sebelum fraud diketahui, sebagai masyarakat pada mulanya tidak menyangka telah terjadi fraud dalam pengelolaan keuangan desa adat karena beranggapan bahwa pengelolaan keuangan desa adat sudah dilakukan dengan baik dan benar. Setelah di ketahui terjadi kecurangan mulai sadar dan lebih peduli dan terus mengikuti perkembangan yang terjadi di desa adat.
Peneliti	: Bagaimana kepercayaan Bapak sebagai krama kepada prajuru desa adat setelah terjadi fraud?
Narasumber	: Awalnya sebelum dilakukan pergantian terhadap Kelihan Desa Adat dan prajurunya terjadi krisis kepercayaan dan setelah terjadi penggantian lambat laun kepercayaan tersebut mulai tumbuh karena penyajian laporan yang disampaikan oleh prajuru yang baru betul-betul transparansi dan akuntable



Rangkuman Hasil Wawancara Penelitian
Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Adat
(Studi Kasus Pada Desa Adat Jimbaran Kabupaten Badung)

Narasumber : Drs. I Wayan Bengkur
Jabatan : Krama Desa Adat Jimbaran
Hari/Tanggal : Sabtu 12 Februari 2022
Waktu : 15.00 Wita
Tempat : Rumah tinggal narasumber

Peneliti	: Apakah Bapak mengetahui tentang terjadinya fraud pengelolaan keuangan Desa Adat Jimbaran?
Narasumber	: Kasus fraud tentang pengelolaan keuangan desa adat pernah terjadi, ketika itu ada temuan dari krama desa adat yang tergabung dalam wadah Forum Peduli Jimbaran menemukan beberapa oknum prajuru desa adat pada saat itu menggunakan dana kas desa adat untuk kepentingan pribadi. Atas temuan inilah munculnya gagasan adanya paruman desa adat dengan skala besar yang berakhir pada di jatuhkannya sanksi adat kepada prajuru bersangkutan.
Peneliti	: Apa yang Bapak rasakan sebagai krama desa adat sebelum fraud diketahui dan setelah fraud diketahui.
Narasumber	: Sebelum adanya temuan fraud, sebagai krama menilai pemerintahan desa adat berjalan sebagaimana mestinya dan kita tentu percaya kepada prajuru desa adat pada saat itu untuk bekerja membangun desa adat dan kita juga merasa senang terutama atas terselenggaranya beberapa kali ngaben masal serta program lain yang menyentuh kepentingan masyarakat.

	<p>Tetapi setelah ada temuan fraud tentu sebagai krama sedih .marah .kecewa seperti tidak percaya tapi itu terjadi dan beruntung saja tidak di berlakukan sanksi kesepekan.</p>
Peneliti	: Bagaimana kepercayaan Bapak sebagai krama desa adat kepada prajuru desa adat setelah terjadi fraud?
Narasumber	: Dengan kejadian itu tentu sebagai krama kehilangan kepercayaan terhadap prajuru dan berharap kepada kelihan desa adat pada periode selanjutnya untuk tidak memakai lagi oknum yang terlibat sebagai prajuru. Selain itu juga selalu rutin mengikuti perkembangan desa adat dengan selalu membaca laporan pertanggung jawaban keuangan desa adat.
Peneliti	: Saran yang dapat Bapak berikan kepada prajuru untuk mencegah terjadinya fraud pengelolaan keuangan desa adat.
Narasumber	: Setiap pemilihan prajuru desa adat mesti memilih yang memiliki komitmen dan itegritas, yang mau mengabdikan untuk desa adat, memahami fungsi tugas yang di emban serta berperilaku jujur dan transparan.

